



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
TAHUN 2019**



Pemerintah Provinsi Sumatera Utara



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PROVINSI
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 8 Telepon : 4150461 – 4524309, Fax : 4150194
Medan - 20154

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan, 16 Maret 2020



LASRO MARGUN, SH. M.Hum
Rembina Utama Muda
NIP.19641201 198701 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2019 merupakan tahun pertama periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk tetap melakukan perbaikan secara terus menerus seperti penyempurnaan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi hasil, peningkatan komitmen seluruh aparatur sipil negara dan penguatan manajemen kinerja.

Semoga Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 ini dapat menjadi bahan koreksi internal penyelenggaraan pemerintahan guna keberlanjutan pembangunan daerah di masa yang akan datang dan juga dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi eksternal publik.

Medan, 2020
GUBERNUR SUMATERA UTARA

EDY RAHMAYADI



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat Provinsi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkiP) tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 yang menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan, program dan kegiatan pembangunan.

Keberhasilan dan kegagalan selama tahun 2019 perlu evaluasi guna mengetahui dan menilai capaian-capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi ini berguna untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 yaitu Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara	2
1.4 Isu Strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	5
BAB II : 2.1 Rencana Strategis Tahun 2019-2023	8
2.1.1 Visi dan Misi	8
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	10
2.2 Indikator Kinerja Utama	13
2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019	15
BAB III : Akuntabilitas Kinerja.....	18
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	19
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis.....	20
3.3 Capaian Kinerja Tahun 2019.....	22
3.3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019	22
3.3.2 Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2019	24
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	47
3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	49
3.6 Keberhasilan dan Permasalahan/Kegagalan Kinerja	51
BAB IV : Penutup	60
A. Kesimpulan	60
B. Langkah yang akan dilaksanakan di masa mendatang	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023	10
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023	13
Tabel 2.3	: Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019...	16
Tabel 3.1	: Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	18
Tabel 3.2	: Capaian Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 3.3	: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023	21
Tabel 3.4	: Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2019	22
Tabel 3.5	: Konsumsi Pangan Penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018	25
Tabel 3.6	: Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara per Subsektor, November 2019 – Desember 2019 (2012=100)	26
Tabel 3.7	: PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (juta rupiah)	30
Tabel 3.8	: Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin Sumatera Utara menurut Daerah dari September 2018-September 2019	32
Tabel 3.9	: Sistem Kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara	34
Tabel 3.10	: Bantuan Sambungan Listrik Bagi Masyarakat Tidak Mampu Tahun Anggaran 2019	36
Tabel 3.11	: Kapasitas Pembangkit Eksisting PT. PLN (Persero)	36
Tabel 3.12	: Kapasitas Pembangkit Eksisting Sewa	37
Tabel 3.13	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Menurut Komponen, 2010-2018	39
Tabel 3.14	: Laporan Hasil Evaluasi AKIP	40
Tabel 3.15	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	43
Tabel 3.16	: Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	48
Tabel 3.17	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah	50
Tabel 3.18	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Standar Nasional	52
Tabel 3.19	: Alokasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan Perangkat Daerah Pengelola APBD Pemprov TA.2019 .	59
Tabel 3.20	: Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan SP2D APBD Pemprov TA. 2019	61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	: Rumah Layak Huni	12
Grafik 3.2	: Indeks Resiko Bencana Sumatera Utara	45



1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia, setiap penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya. Sistem dimaksud adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencakup Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Penyelenggaraan sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkIP) menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang saat ini sedang dijalankan pemerintah, dan merupakan bentuk penerapan dari praktik pemerintahan yang baik (good governance). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) akan mewujudkan tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah (governance), pembangunan (development), dan pelayanan publik (public services). Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023, Rencana Kerja Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Presiden, DPRD, masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Laporan kinerja instansi pemerintah diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Sumatera Utara;
2. Menjadikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah provinsi Sumatera Utara guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat Sumatera Utara terhadap penyelenggaraan pemerintah provinsi Sumatera Utara.

1.3. GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

a. Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Utara memiliki luas total sebesar kurang lebih 182.414,25 km² yang terdiri dari luas daratan sebesar kurang lebih 72.981,23 km² dan luas lautan sebesar kurang lebih 109.433,02 km². Berdasarkan luas wilayah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, luas wilayah terbesar adalah kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00 km², atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti kabupaten Mandailingnatal dengan luas

6.134,00 km² atau 8,40 persen kemudian kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6.030,47km² atau sekitar 8,26 persen, sedangkan luas wilayah terkecil adalah kota Tebingtinggi dengan luas wilayah 31,00 km² atau sekitar 0,04 persen.

Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- J) Sebelah Utara : Provinsi Nanggroe Aceh
- J) Sebelah Barat : Samudera Hindia
- J) Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat
- J) Sebelah Timur : Selat Malaka

b. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1^o - 4^o lintang utara dan 98^o - 100^o bujur timur. Provinsi Sumatera Utara memiliki 213 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 pulau di wilayah pantai timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan Selat Malaka dan sisanya 207 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat. Secara regional pada posisi geografis, Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

c. Topografi

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari utara ke selatan. Kemiringan tanah antara 0 – 12 persen seluas 47.810 km², antara 12 – 40 persen seluas 6.305 km² dan diatas 40 persen seluas 17.719 km², sedangkan luas wilayah Danau Toba 1.129,20 ha atau 1,57 persen. Wilayah pantai timur merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 km² atau 34,77 persen dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembapan tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis. Wilayah dataran tinggi dan wilayah pantai barat seluas 46.758,69 km² atau 65,23 persen dari luas wilayah Sumatera Utara, sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi, dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil.

d. Geologi

Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah timur dan lempeng australia di sebelah barat. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patahan, rekahan dan pelipatan disertai vulkanik. Jalur patahan (subduction) di pantai barat sepanjang \pm 250 km merupakan pusat-pusat gempa di dasar laut. Kondisi struktur geologi yang kompleks dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan, terlipat dengan patahan selain merupakan jalur gempa juga potensial menimbulkan tanah longsor terhadap sekitar 40-50 persen dari luas wilayah Sumatera Utara.

e. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Sumatera Utara terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau, rawa, dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan wilayah terbagi atas 71 Daerah Aliran Sungai (DAS). Jumlah induk sungai di Sumatera Utara sebanyak 99 buah, anak sungai sebanyak 783 buah, ranting sungai sebanyak 659 buah, anak ranting sungai 342 buah.

f. Klimatologi

- Tipe Iklim

Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin passat dan angin muson, dan musim yang ada yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret.

- Curah Hujan

Curah hujan relatif tinggi berkisar 1.431 – 2.265 mm per tahun atau rata-rata 2.100 mm per-tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 173 – 230 hari per tahun.

- Suhu dan Kelembaban Udara

Ketinggian permukaan dataran Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter diatas permukaan laut, beriklim cukup panas mencapai 35,80°C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya mencapai 13,40°C. Kelembaban udara rata-rata 78%-91%.

g. Penggunaan Lahan

- Penggunaan Lahan untuk kawasan Budidaya

Penggunaan lahan Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh kegiatan perkebunan seluas 2.946.512 ha atau sekitar 41 persen dan hutan seluas 2.381.013 ha atau sekitar 33 persen.

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, meliputi areal seluas 57 persen dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu 69 persen dari luas hutan di Sumatera Utara. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti : industri, transportasi dan pertambangan tidak terlalu besar mengubah pemanfaatan ruang yang ada.

- Penggunaan lahan untuk kawasan lindung

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara jo. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 1076 / MENLHK- PTKL / KUH / PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara s/d Tahun 2016, disebutkan bahwa luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah $\pm 3.010.160,89$ ha atau $\pm 41,25$ persen dari luas total wilayah daratan. Kawasan hutan tersebut dengan fungsi hutan konservasi seluas $\pm 424.476,01$ ha; hutan lindung seluas $\pm 1.197.174,58$ ha; hutan produksi terbatas seluas $\pm 634.521,04$ ha, hutan produksi tetap seluas $\pm 675.345,69$ dan hutan produksi konversi seluas $\pm 78.643,58$ ha.

1.4. Isu Strategis (Strategic Issued) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

Isu strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 adalah :

1. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas dan kemaritiman dengan isu strategis :
 - a) Pengembangan pusat kegiatan ekonomi pada kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara;
 - b) Peningkatan aksesibilitas pada daerah tertinggal, terdepan dan wilayah perbatasan;

- c) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar (rumah layak huni, air minum, sanitasi dan listrik);
 - d) Percepatan penyediaan layanan komunikasi dan informatika di wilayah perdesaan, pulau terluar dan terdepan di Sumatera Utara;
 - e) Peningkatan konektivitas pada wilayah bagian dataran tinggi dan pantai barat serta kepulauan Nias.
2. Pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan melalui pengembangan pertanian, industri pengolahan, pariwisata, jasa dan perdagangan antara lain:
- a) Peningkatan nilai tambah ekonom dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
 - b) Peningkatan skill dan daya saing tenaga kerja;
 - c) Kemudahan dan perluasan akses keuangan/pembiayaan;
 - d) Peningkatan daya saing produk industri bernilai tambah;
 - e) Peningkatan dan optimalisasi sektor jasa;
 - f) Peningkatan dan optimalisasi sektor pariwisata.
3. Peningkatan pembangunan SDM dan pengurangan kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, antara lain:
- a) Mempercepat pengurangan kemiskinan;
 - b) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - c) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - d) Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak;
 - e) Percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar (rumah layak huni, air minum, sanitasi dan listrik).
4. Peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air serta mitigasi bencana, antara lain:
- a) Peningkatan kebutuhan energi;
 - b) Pemenuhan kebutuhan pangan;
 - c) Peningkatan kesejahteraan petani;
 - d) Peningkatan layanan irigasi;
 - e) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk memenuhi kebutuhan air untuk pertanian, industri dan rumah tangga;
 - f) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - g) Adaptasi iklim dan mitigasi bencana.

5. Peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan pencegahan korupsi:
- a) Belum maksimalnya pelaksanaan SAKIP;
 - b) Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemprov;
 - c) Belum tersedianya regulasi untuk pelaksanaan dana desa di tingkat provinsi;
 - d) Belum optimalnya koordinasi kelembagaan penyelenggaraan Pemerintah Desa (Kades/lurah/babinkamtibmas/babinsa);
 - e) Belum optimalnya pengembangan kawasan unggulan pedesaan dan pemanfaatan dana desa;
 - f) Belum optimalnya penegakan peraturan daerah;
 - g) Kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan terorisme yang sering disebut Narkoba-Terrorism;
 - h) Melemahnya pemahaman ideologi kebangsaan dan wawasan kebangsaan;
 - i) Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Daerah.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 (lima) tahun ke depan mampu menjawab tuntutan strategis lokal, nasional dan global namun dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyeleraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

2.1.1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 – 2025. Visi pembangunan jangka menengah provinsi Sumatera Utara merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Adapun visi provinsi Sumatera Utara tahun 2009 – 2023 adalah :

“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut :

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan

golongan yang memiliki hal dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera Utara;

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktifitas keseharian;

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 sebagai berikut:

➤ Misi Pertama :

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;

➤ Misi Kedua :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;

➤ Misi Ketiga :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;

➤ Misi Keempat :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia;

➤ Misi Kelima :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan pada isu-isu dan analisis strategik. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategik.

Tabel 2.1

Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 adalah:

Misi	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran
Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau	1.1	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang religius	1.1.1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan umat beragama
	1.2	Terwujudnya pangan yang cukup	1.2.1	Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
	1.3	Terwujudnya kesejahteraan petani	1.3.1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)
	1.4	Terwujudnya peningkatan kualitas hunian kawasan permukiman	1.4.1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Rasio rumah layak huni

	1.5	Terwujudnya kesehatan masyarakat yang prima	1.5.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
Misi	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran
Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau	1.6	Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha	1.6.1	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka
	1.7	Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	1.7.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB
			1.7.2	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Kemiskinan
			1.7.3	Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	Indeks Gini
			1.7.4	Meningkatnya infrastruktur dasar	- Tingkat kemantapan jalan provinsi; - Rasio Elektrifikasi
	1.8	Terjaminnya stabilitas permintaan barang dan jasa serta harga-harga terjangkau	1.8.1	Terkendalnya inflasi	Inflasi
1.9	Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang	1.9.1	Terekendalnya jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	
1.10	Terwujudnya masyarakat yang memperoleh kehidupan yang layak	1.10.1	Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan	2.1	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik	2.1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas	- Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis					
---	--	--	--	--	--

Misi	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran
	2.2	Terwujudnya politik yang beretika dengan budaya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis	2.2.1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda)
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri	3.1	Terwujudnya masyarakat yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	3.1.1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Angka rata-rata Lama Sekolah
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia	4.1	Terwujudnya masyarakat yang terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan	4.1.1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat
	4.2	Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	4.2.1	Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab	5.1	Terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan ekologi lingkungan hidup yang berkualitas	5.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	5.2	Terwujudnya penanganan bencana yang responsif dan cepat tanggap	5.2.1	Meningkatnya aksesibilitas penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana

Misi	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran
	5.3	Terwujudnya masyarakat yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan dan beradab dengan pelestarian nilai kekayaan budaya dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan	5.3.1	Terciptanya masyarakat yang berbudaya sesuai dengan norma adat istiadat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 – 2023

Misi	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan,	1	Indeks Kerukunan umat beragama	Poin	77	80	83	85	90
	2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,4	92,3	94,3	96,3	98,1
	3	Nilai Tukar Petani (NTP)	Skor	100,10	100,10	100,10	100,10	100,22
	4	Rasio rumah layak huni	Persen	92,72	93,22	93,72	94,22	94,72
	5	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,74	68,87	69	69,13	70,00
	6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,5	5,45	5,4	5,35	5,3
	7	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7

serta harga-harga yang terjangkau	8	Persentase Kemiskinan	Persen	8,87	8,43	8,04	7,7	7,39
Misi	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					
			2019	2020	2021	2022	2023	
	9	Indeks Gini	Poin	0,325	0,320	0,315	0,310	0,300
	10	- Tingkat kemantapan jalan provinsi;	Persen	82,99	84,52	86,29	88,59	90
		- Rasio Elektrifikasi	Persen	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00
	11	Inflasi	Persen	2,95	2,90	2,85	2,80	2,75
	12	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,86	2,84	2,82	2,8	2,78
13	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,12	71,67	72,22	72,77	73,32	
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis	1	- Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	BB	BB	BB
	2	Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda)	Persen	45	60	75	80	85
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri	1	Angka rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,79	9,97	10,15	10,33	10,50

Misi	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					
			2019	2020	2021	2022	2023	
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia	1	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	Poin	0,90	0,93	0,96	0,96	1
	2	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,87	90,93	91,00	91,08	91,17
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,00	68,70	70,70	71,70	72,70
	2	Indeks Resiko Bencana	Poin	145	134,4	127	121	109
	3	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	280.000	300.000	370.000	400.000	500.000

2.3. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang perlu dilakukan oleh Pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 dan Dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	77
2.	Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,4
3.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Skor	100,10
4.	Meningkatnya kualitas hunian kawasan permukiman	Rasio rumah layak huni	Persen	92,72
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,74
6.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5,5
7.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,3
8.	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase kemiskinan	Persen	8,87
9.	Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	Indeks Gini	Poin	0,325
10.	Meningkatnya infrastruktur dasar	- Tingkat kemantapan jalan Provinsi - Rasio Elektrifikasi	Persen Persen	82,99 99,90
11.	Terkendalinya inflasi	Inflasi	Persen	2,95
12.	Terkendalinya Jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,86
13.	Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	IPM	Poin	71,12
14.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas	- Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah - Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	Opini Predikat	WTP B
15.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penegakan Perda	Persen	45
16.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,79
17.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	Poin	0,90
18.	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender	Poin	90,87
19.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Indeks kualitas lingkungan hidup - Indeks resiko bencana	Poin Poin	68,00 140

20.	Terciptanya masyarakat yang berbudaya sesuai dengan norma adat istiadat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	280.000
-----	---	--	-------	---------

	<p>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</p>
---	--

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kerjanya (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*).

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No.	Nilai Angka	Interpretasi
1	80	Sangat Baik
2	60 – 79,9	Baik
3	50 – 59,9	Sedang
4	0 – 49,9	Kurang

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
I	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau				
1	Indeks Kerukunan umat beragama	Poin	77	76,30	99,09
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,4	89,6	99,16
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	Skor	100,10	99,08	98,98
4	Rasio rumah layak huni	Persen	92,72	93,18	100,46
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,74	68,74	100,29
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,5	5,5	100
7	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,18	5,11	96,42
8	Persentase Kemiskinan	Persen	8,87	8,63	97,29
9	Indeks Gini	Poin	0,325	0,317	102,52
10	- Tingkat kemantapan jalan Provinsi	Persen	82,99	82,19	99,04
	- Rasio Elektrifikasi	Persen	99,90	99,11	99,21
11	Inflasi	Persen	2,95	2,33	126,61
12	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,86	2,82	98,60
13	IPM	Poin	71,12	71,18	100,08
II	Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis				
1	- Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP	-	100
	- Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	
2	Persentase penegakan Perda	Persen	45	57	127

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
III	Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri				
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,79	9,79	100
IV	Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia				
1	- Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	Poin	0,90	1,18	131
	- Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,87	90,93	100,07
V	Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab				
1	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,00	68,2	97,65
	- Indeks Resiko Bencana	Poin	145	145	100
	- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	280.000	1.377.067	492

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2019 – 2023 maupun RKPD tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/percepatan dan kegagalan/perlambatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 dan indikator kinerja utama (IKU) telah ditetapkan 20 (dua puluh) sasaran strategis dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023

SASARAN	URAIAN	JUMLAH	INDIKATOR
Sasaran 1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama
Sasaran 2	Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Sasaran 3	Meningkatnya kesejahteraan petani	1	Nilai Tukar Petani (NTP)
Sasaran 4	Meningkatnya kualitas hunian kawasan permukiman	1	Rasio rumah layak huni
Sasaran 5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (UHH)
Sasaran 6	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat pengangguran terbuka
Sasaran 7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Pertumbuhan PDRB
Sasaran 8	Menurunnya angka kemiskinan	1	Persentase kemiskinan
Sasaran 9	Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	1	Indeks Gini
Sasaran 10	Meningkatnya infrastruktur dasar	2	- Tingkat kemantapan jalan Provinsi - Rasio Elektrifikasi
Sasaran 11	Terkendalinya inflasi	1	Inflasi
Sasaran 12	Terkendalinya Jumlah penduduk	1	Total Fertility Rate (TFR)
Sasaran 13	Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	1	IPM
Sasaran 14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas	2	- Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah - Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)
Sasaran 15	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1	Persentase penegakan Perda
Sasaran 16	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah
Sasaran 17	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan	1	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat
Sasaran 18	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	1	Indeks pembangunan gender
Sasaran 19	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2	- Indeks kualitas lingkungan hidup - Indeks resiko bencana
Sasaran 20	Terciptanya masyarakat yang berbudaya sesuai dengan norma adat istiadat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

3.3 Capaian Kinerja Tahun 2019

3.3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019- 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kerukunan umat beragama						
1	Indeks Kerukunan umat beragama	Poin	77	76,30	99,09	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2 : Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan						
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,4	89,6	99,16	Sangat baik
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kesejahteraan petani						
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Skor	100,10	99,08	98,98	Sangat Baik
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas hunian kawasan permukiman						
1	Rasio rumah layak huni	Persen	92,72	93,18	100,46	Sangat Baik
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,74	68,74	100,29	Sangat Baik
Sasaran Strategis 6 : Menurunnya tingkat pengangguran						
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,5	5,5	100	Sangat Baik
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi						
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,18	5,11	96,42	Sangat Baik
Sasaran Strategis 8 : Menurunnya angka kemiskinan						
1	Persentase Kemiskinan	Persen	8,87	8,63	97,29	Sangat Baik
Sasaran Strategis 9 : Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan						
1	Indeks Gini	Poin	0,325	0,317	102,52	Sangat Baik
Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya infrastruktur dasar						
1	Tingkat kemantapan jalan Provinsi	Persen	82,99	82,19	99,04	Sangat Baik
Sasaran Strategis 11 : Terkendalinya inflasi						
1	Inflasi	Persen	2,95	2,33	126,61	Sangat Baik
2	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,90	99,11	99,21	Sangat Baik

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
Sasaran Strategis 12 : Terkendalinya Jumlah penduduk						
1	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,86	2,82	98,60	Sangat Baik
Sasaran Strategis 13 : Meningkatkan derajat kualitas hidup sosial masyarakat						
1	IPM	Poin	71,12	71,18	100,08	Sangat Baik
Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas						
1	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP	-		
2	Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	100	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat						
1	Persentase penegakan Perda	Persen	45	57	127	Sangat Baik
Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan						
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,79	9,79	100	Sangat Baik
Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan						
1	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	Poin	0,90	1,18	131	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan						
1	Indeks pembangunan gender	Poin	90,87	90,93	100,07	Sangat Baik
Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66	68,2	103,3	Sangat Baik
2	Indeks Resiko Bencana	Poin	145	145,25		Tinggi
Sasaran Strategis 2 : Terciptanya masyarakat yang berbudaya sesuai dengan norma adat istiadat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata						
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	280.000	1.377.067	492	Sangat Baik

3.3.2 Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2019

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai sasaran strategis dan indikator kinerja utama akan dijelaskan berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023.

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

Misi I ini terdiri dari 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan diukur melalui 16 (enam belas) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 : meningkatnya kerukunan umat beragama. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian “baik”. Indikator dimaksud adalah :

➤ Indeks Kerukunan Umat Beragama

Survei untuk kerukunan umat beragama dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat) Kementerian Agama Republik Indonesia. Merujuk pada angka kerukunan umat beragama nasional (73,83) terdapat sejumlah provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional. Indeks ini menarik beberapa rumusan, (salah satunya) adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan beribadah masing-masing. Untuk provinsi Sumatera Utara skor indeks kerukunan umat beragama berada di atas rata-rata nasional yaitu 76,30 dengan kategori Baik.

Sasaran Strategis 2 : terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian “sangat baik”.

Indikator dimaksud adalah :

➤ Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pangan berperan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Ketersediaan pangan yang cukup, seimbang, dan berkualitas akan meningkatkan kualitas hidup. Berbagai tantangan dan permasalahan harus dihadapi dan dipecahkan dalam melaksanakan pembangunan pangan. Kapasitas sumberdaya alam untuk memproduksi pangan akan semakin terbatas. Persaingan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air untuk kegiatan sektor lain akan semakin tinggi. Beragamnya jenis pangan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi konsumsi gizi. Semakin beragam jenis pangan

yang dikonsumsi, semakin mudah untuk mencukupi kebutuhan gizi, bahkan berbagai zat gizi tambahan lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan juga dapat diperoleh. Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Indonesia diukur dengan menggunakan metode pengukuran Pola Pangan Harapan (PPH).

Capaian pola pangan harapan (PPH) Sumatera Utara tahun 2019 yaitu 89,6 mengalami peningkatan sebesar 0,50 persen dari tahun 2018 yaitu 89,1. Peningkatan ini belum mencapai target yang ditetapkan (90,4), hal ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk masih belum beragam, bergizi dan berimbang antar kelompok pangan yang menandakan konsumsi masyarakat terhadap kelompok bahan pangan masih belum bervariasi.

Tabel 3.5
Konsumsi Pangan Penduduk Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2013 s/d 2018

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Pangan (kg/baharwan)					Konsumsi Protein (gram/baharwan)					Konsumsi Energi (kWh/baharwan)					Konsumsi Protein (gram/penduduk/baharwan)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
I. Pati-pati	118,9	130,4	142,3	154,2	165,9	177,8	189,7	201,6	213,5	225,4	237,3	249,2	261,1	273,0	284,9	296,8	308,7	320,6		
a. Nasi	7,2	7,5	7,8	8,1	8,4	8,7	9,0	9,3	9,6	9,9	10,2	10,5	10,8	11,1	11,4	11,7	12,0	12,3		
b. Jagung	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9		
c. Tempa	7,5	7,8	8,1	8,4	8,7	9,0	9,3	9,6	9,9	10,2	10,5	10,8	11,1	11,4	11,7	12,0	12,3	12,6		
II. Umbi-umbian	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5		
a. Singkong	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5		
b. Ubi jalar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
c. Kentang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
d. Boga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
e. Umbi lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
III. Pangan Protein	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3		
a. Daging merah	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		
b. Daging unggas	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
c. Telur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
d. Susu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
e. Ikan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
IV. Minyak dan Lemak	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4		
a. Minyak kelapa	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4		
b. Minyak sawit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
c. Minyak lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
V. Bumbu-bumbu	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
a. Cabe	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
b. Garam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
VI. Kacang-kacangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
a. Kedelai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
b. Kacang tanah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
c. Kacang hijau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
d. Kacang lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
VII. Gula	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
a. Gula pasir	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
b. Gula lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
VIII. Sayuran dan Buah	88,7	89,4	90,1	90,8	91,5	92,2	92,9	93,6	94,3	95,0	95,7	96,4	97,1	97,8	98,5	99,2	99,9	100,6		
a. Sayur	30,5	30,8	31,1	31,4	31,7	32,0	32,3	32,6	32,9	33,2	33,5	33,8	34,1	34,4	34,7	35,0	35,3	35,6		
b. Buah	58,2	58,6	59,0	59,4	59,8	60,2	60,6	61,0	61,4	61,8	62,2	62,6	63,0	63,4	63,8	64,2	64,6	65,0		
IX. Lainnya	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8		
a. Minuman	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8		
b. Bumbu-bumbu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Jumlah	208,2	219,8	231,4	243,0	254,6	266,2	277,8	289,4	301,0	312,6	324,2	335,8	347,4	359,0	370,6	382,2	393,8	405,4		
% BPH	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0		
% BPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PPH: capaian 400-2.000 kkal/baharwan	81,0	81,7	82,4	83,1	83,8	84,5	85,2	85,9	86,6	87,3	88,0	88,7	89,4	90,1	90,8	91,5	92,2	92,9		
PPH: capaian 400-1.700 kkal/baharwan	78,0	78,4	78,8	79,2	79,6	80,0	80,4	80,8	81,2	81,6	82,0	82,4	82,8	83,2	83,6	84,0	84,4	84,8		

Sumber: Sachris 2019, 2018. BPS dan data diolah/kasi capaian pendataan pengolahan oleh BPS

Sasaran Strategis 3 : Nilai Tukar Petani (NTP). Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

➤ Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani yang juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Sumatera Utara pada Desember 2019, NTP Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen dibanding November 2019, yaitu dari 98,91 menjadi 99,08.

Nilai Tukar Petani terdiri dari beberapa subsektor, yaitu :

1. Subsektor Tanaman Pangan/Padi dan Palawija (NTPP); mengalami penurunan sebesar 0,20 persen, hal ini karena perubahan Indeks Harga yang diterima Petani (It) sebesar -0,18% lebih rendah dibandingkan perubahan pada Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib) sebesar 0,02%. Perubahan pada It karena indeks kelompok padi turun sebesar 0,92% yaitu dari 128,92 menjadi 127,74. Sedangkan indeks kelompok palawija naik sebesar 1,55% yaitu dari 129,19 menjadi 131,20.;
2. Subsektor Hortikultura (NTPH); mengalami penurunan sebesar 3,24 persen, hal ini karena perubahan It (-3,18%) lebih rendah dibandingkan perubahan pada Ib (0,06%). Perubahan pada It karena indeks kelompok sayur-sayuran turun sebesar 5,95% yaitu dari 133,28 menjadi 125,35. Sedangkan indeks kelompok buah-buahan naik sebesar 0,07% yaitu dari 130,35 menjadi 130,44 dan indeks kelompok tanaman obat naik sebesar 1,06% yaitu dari 124,17 menjadi 125,48;
3. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR); mengalami kenaikan sebesar 1,86 persen, hal ini karena perubahan It (1,72%) lebih tinggi dibandingkan perubahan pada Ib (-0,14%). Perubahan pada It karena indeks kelompok tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 1,72% yaitu dari 137,56 menjadi 139,92;
4. Subsektor Peternakan (NTPT); mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen, hal ini disebabkan oleh perubahan It (-0,12%) lebih besar dibandingkan perubahan pada Ib (-0,14%). Kenaikan It karena indeks kelompok ternak besar naik sebesar 0,06%, indeks kelompok ternak kecil turun sebesar 0,93%, indeks kelompok unggas naik sebesar 0,49%, dan indeks kelompok hasil ternak naik sebesar 0,65%;

5. Subsektor Perikanan (NTNP); mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen, hal ini disebabkan oleh perubahan It (-0,12%) lebih besar dibandingkan perubahan pada Ib (-0,14%). Kenaikan yang terjadi pada It karena perubahan indeks kelompok penangkapan ikan secara rata-rata naik sebesar 1,74%. Sedangkan indeks kelompok budidaya ikan secara rata-rata naik sebesar 1,02%.

Tabel 3.6
 Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara per Subsektor, November 2019 – Desember 2019
 (2012=100)

Subsektor		November 2019	Desember 2019	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tanaman Pangan (Padi & Palawija)			
a.	Nilai Tukar Petani Padi & Palawija (NTPP)	91,92	91,74	-0,20
b.	Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	129,00	128,77	-0,18
	- Padi	128,92	127,74	-0,92
	- Palawija	129,19	131,20	1,55
c.	Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	140,34	140,37	0,02
	- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	143,85	143,74	-0,07
	- Indeks BPPBM	129,36	129,80	0,33
2.	Hortikultura			
a.	Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	94,81	91,74	-3,24
b.	Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	131,86	127,67	-3,18
	- Sayur-sayuran	133,28	125,35	-5,95
	- Buah-buahan	130,35	130,44	0,07
	- Tanaman Obat	124,17	125,48	1,06
c.	Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	139,08	139,16	0,06
	- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	142,37	142,45	0,06
	- Indeks BPPBM	124,45	124,51	0,05
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat			
a.	Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)	97,38	99,20	1,86
b.	Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	137,56	139,92	1,72
	- Tanaman Perkebunan Rakyat	137,56	139,92	1,72
c.	Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	141,25	141,05	-0,14
	- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	143,62	143,30	-0,22
	- Indeks BPPBM	128,49	128,90	0,32

	Subsektor	November 2019	Desember 2019	Persentase Perubahan
	(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Peternakan			
	a. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	114,78	114,80	0,02
	b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	151,46	151,28	-0,12
	- Ternak Besar	161,11	161,20	0,06
	- Ternak Kecil	138,54	137,260	-0,93
	- Unggas	133,66	134,31	0,49
	- Hasil Ternak	123,72	124,52	0,65
	c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	131,96	131,78	-0,14
	- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	143,14	142,84	-0,21
	- Indeks BPP3M	122,12		
5.	Perikanan			
	a. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidayaan Ikan (NTNI)	102,34	103,63	1,25
	b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan Pembudidayaan Ikan (It)	137,49	139,41	1,40
	c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan dan Pembudidayaan Ikan (Ib)	134,35	134,53	0,14
	- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	140,66	140,72	0,04
	- Indeks BPP3M	127,17	127,46	0,23
5.1	Perikanan Tangkap			
	a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,90	109,74	1,71
	b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It)	145,02	147,54	1,74
	- Penangkapan Perairan Umum	131,05	130,44	-0,47
	- Penangkapan Laut	145,17	147,72	1,76
	c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib)	134,40	134,44	0,03
	- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	140,70	140,75	0,03
	- Indeks BPP3M	125,19	125,21	0,02
5.2	Perikanan Budidaya			
	a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	96,74	97,49	0,77
	b. Indeks Harga yang Diterima Pembudidaya Ikan (It)	129,91	131,24	1,02
	- Budidaya Air Tawar	135,35	136,97	1,19
	- Budidaya Laut	104,23	104,23	0,00
	- Budidaya Air Payau	105,10	105,10	0,00
	c. Indeks Harga yang Dibayar Pembudidaya Ikan (Ib)	134,29	134,62	0,25
	- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	140,62	140,68	0,04
	- Indeks BPP3M	129,16	129,72	0,43
	Gabungan/Provinsi Sumatera Utara			
	a. Nilai Tukar Petani (NTP)	98,91	99,08	0,18
	b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	137,12	137,28	0,12
	c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	138,64	138,55	-0,06
	- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	143,32	143,13	-0,13
	- Indeks BPP3M	126,83	127,09	0,21
	Gabungan/Provinsi Sumatera Utara tanpa Perikanan			
	a. Nilai Tukar Petani (NTP)	98,81	98,95	0,14
	b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	137,11	137,22	0,08
	c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	138,76	138,67	-0,07
	- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	143,40	143,20	-0,13
	- Indeks BPP3M	126,82	127,08	0,21

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas hunian dan lingkungan kawasan permukiman. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian “Sangat Baik”. Indikator dimaksud adalah :

➤ Rasio Rumah Layak Huni

Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni juga menjadi tantangan sesuai dengan misi pembangunan Sumatera Utara periode 2019 – 2023 yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan. Kriteria rumah tangga layak huni menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dihitung melalui kriteria :

1. Luas lantai perkapita > 7,2 meter persegi;
2. Sumber air minum layak;
3. Sanitasi layak;
4. Sumber penerangan listrik;
5. Jenis atap bukan dari daun atau lainnya;
6. Jenis dinding bukan dari bambu atau lainnya;
7. Jenis lantai bukan lantai tanah.

Dari ketujuh kriteria diatas, rumah tangga yang memenuhi minimal 5 kriteria tersebut termasuk dalam kategori rumah tangga layak huni.

Dari catatan BPS sejak tahun 2013 hingga 2018 terlihat pertumbuhan rumah layak huni terus meningkat, dari 86,12 % tahun 2013 menjadi 93,18 % ditahun 2018. Artinya dari 3.332.796 rumah yang ada, masih terdapat sekitar 227.296 rumah yang membutuhkan penanganan agar menjadi rumah yang layak huni.

Grafik 3.1.
Rumah Layak Huni



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2013-2018

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio rumah layak huni antara lain melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pendataan rehabilitasi rumah layak huni yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten / kota, badan usaha dan pemerintah pusat. Rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 dilaksanakan di Deli Serdang 110 unit, Langkat 110 unit, Padang Sidempuan 90 unit, Tapanuli Selatan 90 unit, Mandailing Natal 90 unit, Labuhan Batu 90 unit, Labuhanbatu Selatan 90 unit, Batubara 90 unit, Tapanuli Utara 90 unit dan Humbanghasundutan 90 unit.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "sangat baik". Indikator dimaksud adalah:

➤ Usia Harapan Hidup (UHH)

UHH penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan memperhitungkan trend kecenderungan peningkatan UHH kurun waktu 2010 – 2018 (9 tahun terakhir), dimana terjadi peningkatan usia harapan hidup penduduk sebesar 0,13 tahun setiap tahunnya, maka diperkirakan UHH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 adalah 68,74 tahun. UHH ini merupakan data melalui perhitungan trend kecenderungan, kemungkinan terjadi perubahan UHH setelah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dirilis pada pertengahan tahun berjalan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diterbitkan oleh BPS, terjadi peningkatan UHH penduduk Sumatera Utara dari tahun ke tahun yakni 68,61 tahun pada tahun 2018; 68,37 tahun pada tahun 2017; 68,29 tahun pada tahun 2016; 68,21 tahun pada tahun 2015; 68,04 tahun pada tahun 2014 dan 67,46 tahun pada tahun 2010.

Sasaran Strategis 6 : Menurunnya tingkat pengangguran. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

➤ Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara menurun pada Februari 2019. Angka tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara turun 0,03 poin menjadi 5,56 persen pada Februari 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara tahun 2018 sebesar 5,59 persen. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 7,45 juta orang, naik 224 ribu orang dibanding Februari 2018.

Sejalan dengan itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik 1,21 poin. Persentase lapangan pekerjaan utama penduduk bekerja yang mengalami peningkatan adalah Pertanian (1,51 poin), Penyediaan Akomodasi (1,14 poin) dan Transportasi (0,50 poin). Sedangkan yang mengalami penurunan pada Perdagangan (1,79 poin), Administrasi Pemerintahan (0,41 poin) dan Industri Pengolahan (0,35 poin).

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

➤ Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Perekonomian Sumatera Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2019 mencapai Rp 204.398,35 milyar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 137.473,26 milyar.

Ekonomi Sumatera Utara triwulan III-2019 terhadap triwulan III-2018 tumbuh 5,11 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,85 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh semua komponen, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) sebesar 11,39 persen.

Ekonomi Sumatera Utara triwulan III-2019 terhadap triwulan sebelumnya meningkat sebesar 3,06 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,73 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen impor barang dan jasa sebesar 15,33 persen.

Tabel 3.7

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
	Triw II-2019	Triw III-2019	Triw II-2019	Triw III-2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40 401 484,16	41 905 239,93	33 071 023,81	34 304 267,38
B. Pertambangan dan Penggalian	2 487 492,54	2 597 040,80	1 755 498,20	1 804 658,46
C. Industri Pengolahan	37 417 670,70	38 531 333,34	23 976 232,58	24 732 545,96
D. Pengadaan Listrik dan Gas	225 382,91	228 628,11	180 652,71	183 260,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	198 775,93	201 470,88	128 863,18	130 602,83

F.	Konstruksi	28 008 166,47	28 944 833,03	17 054 123,55	17 593 033,85
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	37 514 979,01	39 237 873,56	23 996 975,25	24 757 079,83
H.	Transportasi dan Pergudangan	10 065 182,42	10 334 899,83	6 399 746,44	6 557 164,68
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4 799 921,19	4 907 898,99	3 273 156,11	3 341 757,81
J.	Informasi dan Komunikasi	4 213 337,10	4 377 285,00	3 808 595,10	3 911 808,03
K.	Jasa Keuangan	5 822 680,28	5 846 169,20	3 770 398,48	3 795 235,71
L.	Real Estat	10 057 652,10	10 462 206,48	5 665 549,38	5 788 491,80
M, N	Jasa Perusahaan	2 118 201,63	2 247 872,17	1 227 083,83	1 258 129,05
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7 477 114,61	7 530 921,07	4 391 634,99	4 515 910,26
P.	Jasa Pendidikan	3 605 497,38	3 767 962,91	2 712 504,69	2 773 536,05
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1 982 638,46	2 073 714,33	1 283 193,98	1 315 787,10
R, S, T,U	Jasa Lainnya	1 154 401,88	1 203 804,96	696 197,61	709 982,33
PDRB		197 550 588,78	204 398 354,49	133 391 429,90	137 473 259,25

Sasaran Strategis 8 : Menurunnya angka kemiskinan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

➤ Persentase Kemiskinan

Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,20 poin yaitu dari 8,83 persen pada Maret 2019 menjadi 8,63 persen pada September 2019. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,26 juta jiwa pada September 2019, atau berkurang sekitar 22 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. Pada periode Maret 2019 – September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan peningkatan. P1 naik dari 1,371 pada Maret 2019 menjadi 1,480 pada September 2019, dan P2 naik dari 0,310 menjadi 0,372. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menurun dan semakin menjauh dari garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin tinggi.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan September 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.260,50 ribu jiwa atau sebesar 8,63 persen terhadap total penduduk. Jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada bulan September 2018 setahun yang lalu, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 1.291,99 ribu jiwa atau sebesar 8,94 persen, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dalam setahun sebesar 31,49 ribu jiwa dan penurunan persentase

penduduk miskin sebesar 0,31 persen poin. Jika dibandingkan dengan keadaan semester lalu pada Maret 2019, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 1.282,04 ribu jiwa dengan persentase 8,83, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebanyak 21,5 ribu jiwa dan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,20 poin. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2019 – September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan pedesaan turun masing-masing sebanyak 10,3 ribu jiwa dan 11,3 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 8,56 persen menjadi 8,39 persen, dan di pedesaan turun dari 9,14 persen menjadi 8,93 persen.

Tabel 3.8
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara menurut Daerah
September 2018 – September 2019

Daerah	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
September 2018	686,97	8,84
Maret 2019	675,74	8,56
September 2019	665,46	8,39
Perdesaan		
September 2018	605,02	9,05
Maret 2019	606,30	9,14
September 2019	595,04	8,93
Perkotaan + Perdesaan		
September 2018	1291,99	8,94
Maret 2019	1282,04	8,83
September 2019	1260,50	8,63

Sumber : diolah dari data survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Sasaran Strategis 9 : Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan pemerataan pembangunan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian “Sangat Baik”. Indikator dimaksud adalah :

➤ Indeks Gini

Pada Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur dengan Indeks Gini tercatat sebesar 0,317. Angka ini meningkat sebesar 0,006 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini September 2018 yang sebesar 0,311.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Indeks Gini. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini Sumatera Utara pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,318 turun menjadi 0,311 pada September 2018, dan mengalami peningkatan kembali menjadi 0,317 pada Maret 2019.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Indeks Gini di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,338. Angka ini meningkat sebesar 0,008 poin dibanding Indeks Gini September 2018 yang sebesar 0,330. Untuk daerah perdesaan Indeks Gini Maret 2019 tercatat sebesar 0,264. Angka ini meningkat sebesar 0,007 poin dibanding Indeks Gini September 2018 yang sebesar 0,257.

Sasaran Strategis 10 : Meningkatkan infrastruktur dasar. Hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

1. Tingkat kemantapan jalan Provinsi

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) fokus meningkatkan kualitas infrastrukturnya mulai jalan, pelabuhan dan angkutan massal. Infrastruktur merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan taraf ekonomi suatu daerah. Sepanjang tahun 2019, total pembangunan dan peningkatan jalan provinsi adalah 89,16 kilometer. Berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara, dari 3.005,65 kilometer jalan provinsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 2.141 kilometer. Jalan yang dibangun di antaranya untuk mendukung kelancaran akses menuju kawasan wisata Tangkahan sepanjang 2 kilometer, jalan menuju Bukitlawang sepanjang 4 kilometer, dan jalan di kawasan Danau Toba melalui akses Rawasaring sepanjang 8,9 kilometer. Selain itu, Pemprov Sumut juga membuka kawasan akses terisolasi menuju Danau Toba dengan membangun jalan pada ruas Jalan Aek Kotabatu–Batas Tobasa-Batas Labura–Parsoburan–Silimbat sepanjang 5,5 kilometer.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan meningkatkan akses jalan ke perbatasan antar provinsi seperti Provinsi Riau pada ruas Jalan Gunungtua–Binanga–Sibuhuan–Ujungbatu–Batas Riau sepanjang 5 kilometer. Perbatasan dengan Sumatera Barat pada ruas Jalan Muarapungkut–Simpangbanyak–Batas Sumatera Barat sepanjang 7,6 kilometer.

2. Rasio elektrifikasi

Kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Sumatera Utara terus meningkat sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan industri serta penambahan penduduk. Listrik merupakan bentuk energi yang paling bermanfaat dan tepat bagi kehidupan manusia moderen seperti sekarang ini, dimana energi listrik mempunyai satu fungsi fundamental yang dapat memberikan suatu kebutuhan atau pelayanan daya listrik yang diperlukan oleh konsumen. Untuk mengatasi berkurangnya pasokan energi, maka Negara telah dan akan membangun pusat pembangkit listrik yang berdaya besar. Daya listrik tersebut akan disalurkan ke pusat beban melalui saluran transmisi dan saluran distribusi.

Ketersediaan energi listrik daerah dapat dilihat dari 2 sisi yang berbeda, yaitu :

a. Sisi Pasokan (Supply side) Energi Listrik

Sistem kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari sistem dengan transmisi 150 kV dan 275 kV serta distribusi 20 kV. Interkoneksi sistem tenaga listrik di Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari sistem Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT) PT. PLN (Persero) yang meliputi Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Interkoneksi Sumbagut dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang pada umumnya berada di Sumatera Utara. Adapun kapasitas Pembangkit pada Tahun 2018 sebesar 3.274 MW dan pada Tahun 2019 di Sumatera Utara adalah sebesar 3.950,4MW dengan daerah pelayanan PLN Wilayah Sumatera Utara sebagai berikut:

Tabel 3.9

Sistem Kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara

No	Area	Jumlah Pelanggan	Daya Tersambung (KVA)	Panjang Jaringan Tegangan Menengah (Kms)	Panjang Jaringan Tegangan Rendah (Kms)	Kapasitas Trafo Terpasang (kva)	Jumlah ULP
1	Medan	702.151	2.108.161	2.499,47	3.416,49	993,141	9
2	Binjai	652.484	818.511	5.271,36	4.556,60	426,097	8
3	Sibolga	258.152	250.910	err3.020,76	3.817,68	143,215	7
4	Nias	96.760	96.541	1.203,29	1.293,58	67,486	3
5	Lubuk Pakam	579.247	908.119	2.757,56	4.118,73	521,479	7
6	Pematang Siantar	639.369	762.191	5.258,71	6.370,88	388,141	12
7	Rantau Prapat	406.077	460.512	3.988,65	4.722,20	308,300	8
8	Padang Sidempuan	306.607	285.612	3.989,81	2.233,96	174,901	7
	Jumlah	3.553.763	5.464.738	27.989,61	30.530,12	3.022.760	61

Sumber : PT. PLN Wilayah Sumatera Utara)

Cakupan Wilayah Kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara meliputi seluruh daerah di Provinsi Sumatera Utara dengan luas 72.981 km². Pada wilayah kerja tersebut, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara melakukan kegiatan pendistribusian dan penjualan tenaga listrik untuk segmen pelanggan Sosial, Rumah Tangga, Bisnis, Industri, dan Publik serta kegiatan pembangkitan pada daerah-daerah yang masih dilayani secara isolated dengan dipasok oleh PLTD.

Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik pada interkoneksi Sumbagut pada tahun 2017 mengalami penambahan daya dikarenakan telah beroperasinya PLTG MPP Paya Pasir sebesar 3x25 MW dan MPP Nias 1x25 MW serta melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah memfasilitasi sampai dengan beroperasinya Marine Vessel Power Plant (MVPP) Belawan sebesar 240 MW.

Selain PT. PLN (Persero), pihak investor juga mempunyai peran dalam penyediaan kelistrikan di Sumatera Utara melalui wilayah usaha penyediaan tenaga listrik. Wilayah usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Usaha PT. Mabar Elektrindo yang berlokasi di Kawasan Industri Medan;
2. Wilayah Usaha PT. Perkebunan Nusantara III yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke Kabupaten Simalungun.

b. Sisi Kebutuhan (Demand side) Energi Listrik

Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2018 sebesar 100,73% dengan Daya listrik Terpasang 3.400 MW sedangkan pada Tahun 2019 Rasio Elektrifikasi Sumatera Utara sebesar 99,11% dengan Daya Listrik Terpasang sebesar 3.950,40 MW. Penurunan Rasio Elektrifikasi Sumatera Utara pada tahun 2019 disebabkan oleh mekanisme perhitungan Rasio Elektrifikasi Sumatera Utara yang berbeda pada tahun 2018. Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi, pemakaian daya listrik juga pasti mengalami peningkatan. Untuk tahun 2018 beban puncak rata rata sudah mencapai 1.731 MW dan daya pasok kurang lebih 2.103 WM, sehingga mempunyai cadangan listrik sekitar 372 MW. Beban puncak sistem Sumatera bagian utara pada tahun 2019 rata-rata sudah mencapai sekitar 2224 MW dan daya mampu pasok kurang lebih 2.505,6 MW, sehingga mempunyai cadangan listrik sekitar 281,6 MW.

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah memberikan bantuan dengan pemasangan bantuan sambungan listrik kepada 800 rumah tangga yang tersebar di 29 Kecamatan dan 106 Desa di Provinsi Sumatera Utara dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.10

Bantuan Sambungan Listrik Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Tahun Anggaran 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH MASYARAKAT
				(KK)
1	SAMOSIR	7	22	100
2	MANDAILING NATAL	3	14	100
3	TAPANULI SELATAN	7	34	100
4	NIAS	2	5	100
5	NIAS BARAT	4	7	100
6	NIAS UTARA	2	7	100
7	NIAS SELATAN	1	7	100
8	GUNUNG SITOLI	3	10	100
TOTAL		29	106	800

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3.11

Kapasitas Pembangkit Eksisting PT. PLN (Persero)

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun
PLTD	SUMBAGUT	6	24,8	13,4	13,4
	Nias	16	17,1	8,3	8,3
	Nias Terluar (Pulau Tello)	15	1,7	0,8	0,8
	Nias Terluar (Lasondre)	2	0,3	0,2	0,2
	Nias Terluar (Tanah Masa)	2	0,5	0,4	0,4
	Nias Terluar (Tanah Bala)	3	0,7	0,6	0,6
	Pulau Sembilan	3	0,3	0,2	0,2
Total		47	45,4	23,9	23,9

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3.12

Kapabilitas Pembangkit Eksisting Sewa

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun
PLTD	Nias	3	24	24	24
Total		3	24	24	24

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Strategis 11 : Terkendalinya inflasi. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

➤ Inflasi

Provinsi Sumatera Utara pada Desember 2019 mengalami deflasi sebesar 0,19 persen. Secara kumulatif daerah ini sepanjang 2019 (Januari-Desember) mengalami inflasi 2,33 persen. Deflasi di Desember terjadi dampak turunnya harga cabai merah yang kerap menjadi pemicu inflasi. Akibat deflasi di Desember, inflasi kumulatif Provinsi Sumatera Utara tertekan atau menjadi 2,33 persen dari posisi November yang masih 2,53 persen. Inflasi Sumut di 2019 yang 2,33 persen itu masih berada pada sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang $3,5 \pm 1$ persen.

Pada bulan Desember, dua daerah yang Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami deflasi yakni Medan 0,28 persen dan Padangsidempuan 0,13 persen. Sementara dua daerah lainnya mengalami inflasi yakni Kota Sibolga 0,51 persen dan Pematangsiantar 0,34 persen.

Sasaran Strategis 12 : Terkendalinya Jumlah Penduduk. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

➤ Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah taksiran jumlah total anak yang dilahirkan oleh 1000 wanita bila para wanita tersebut secara terus menerus hamil pada saat mereka berada dalam tingkat fertilitas menurut usia mereka pada saat sekarang. Angka ini dapat menjawab pertanyaan : berapa rata-rata jumlah anak yang dapat dilahirkan seorang wanita selama masa hidupnya.

Pada tahun 2019 target Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2.86 persen dan terealisasi 2,82 persen. Dapat diartikan bahwa setiap perempuan pada usia subur di Provinsi

Sumatera Utara melahirkan tidak lebih dari 3 (tiga) orang anak tapi belum cukup mencapai target program Keluarga Berencana (KB) yaitu 2 (dua) orang anak.

Jumlah angka kelahiran di Sumatera Utara sudah mengalami penurunan akan tetapi belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh :

1. Penggunaan alat kontrasepsi masih rendah;
2. Tingginya angka putus pakai alat kontrasepsi;
3. Kurangnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB).

Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

➤ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge) yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan standard hidup layak (decent standard of living).

Bayi yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 2018 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 68,61 tahun, lebih lama 0,24 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Anak-anak yang pada tahun 2018 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,14 tahun, lebih lama 0,04 tahun dibandingkan dengan tahun 2017. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,34 tahun, lebih lama 0,09 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, masyarakat Sumatera Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 10,39 juta rupiah per tahun, meningkat 355 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang mengukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperlihatkan bagaimana penduduk mengakses hasil pembangunan. Memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sebesar 71,18 poin. Hal ini dipengaruhi oleh angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta kemampuan daya beli di masyarakat semakin baik.

Tabel 3.13
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Menurut Komponen, 2010-2018

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	67,46	67,63	67,81	67,94	68,04	68,29	68,33	68,37	68,61
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,82	11,83	11,97	12,41	12,61	12,82	13,00	13,10	13,14
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,51	8,61	8,72	8,79	8,93	9,03	9,12	9,25	9,34
Pengeluaran per Kapita	Rp 000	9 196	9 231	9 266	9 309	9 391	9 563	9 744	10 036	10 391
IPM		67,09	67,34	67,74	68,38	68,87	69,51	70,00	70,57	71,18
Pertumbuhan IPM	%	-	0,37	0,59	0,94	0,72	0,93	0,70	0,81	0,86

Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Misi II ini terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

1. Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hal ini terkait dengan target pemerintah untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas 4 (empat) tahapan penilaian yaitu Laporan Keuangan harus sesuai standar akuntansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal dan ketaatan perundang-undangan.

Ada 3 (tiga) jenis pemeriksaan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya opini, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan laporan keuangan untuk melihat apakah sudah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aturan ini menganut basis accrual, dimana aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan basis accrual.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan untuk Laporan Keuangan Tahun 2019 belum diterima, karena pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara baru dilaksanakan pada bulan Januari 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan akan disampaikan pada bulan Mei tahun berjalan.

2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana target yang ditetapkan untuk Tahun 2019 adalah B. Hasil evaluasi yang diterima di tahun 2020 adalah merupakan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018. Sesuai Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai 62,52 dengan Predikat "B". Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.14

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2018	2019
a.	Perencanaan Kinerja	35	19,42	20,42
b.	Pengukuran Kinerja	20	11,09	14,59
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,44	11,64
d.	Evaluasi Internal	10	6,30	5,88
e.	Capaian Kinerja	20	9,87	9,99
	Nilai Hasil Evaluasi	100	56,12	62,52
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

➤ Persentase Penegakan Perda

Untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada dasarnya adalah persyaratan *absolute* yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase Penegakan Perda realisasi capaian sebesar 57 persen.

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provsu Tahun 2019, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan dan / atau dipantau tahun 2019 sebanyak 35 kasus.
- b. Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provsu tahun 2019 sebanyak 20 kasus.

Adapun Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara Sebagai berikut:

1. Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah;
2. Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pemanfaatan Air Permukaan;
4. Pergub Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

Misi III ini terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis dan diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

➤ Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Sumatera Utara tumbuh 1,22 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2018. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Sumatera Utara yang lebih baik. Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia usia

25 tahun ke atas mencapai 9,34 tahun, atau telah menamatkan pendidikan tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

Untuk tahun 2019, rata-rata lama sekolah mencapai target yang ditetapkan yaitu 9,79 tahun.

Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.

Misi IV ini terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

➤ Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Untuk melaksanakan itu maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.

Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat Sumatera Utara pada tahun 2019 lebih baik dari tahun 2018 dengan capaian 1,18 point, dimana pada tahun 2018 jumlah kasus pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan yang tertangani sebanyak 98 kali, sedangkan pada tahun 2019 menurun 15 kali menjadi 83 kali.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

➤ Indeks Pembangunan Gender

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Capaian indeks pemberdayaan gender Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 terealisasi 90,93 persen dari target yang direncanakan 90,87 persen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah keterwakilan kaum perempuan dalam pembangunan dan akses ekonomi serta keterwakilan perempuan di instansi pemerintahan, swasta, dan menjadi Pimpinan (pembuat keputusan) dan anggota parlemen mengalami peningkatan. Ini menunjukkan pembangunan manusia Indonesia menurut kesadaran gender menunjukkan trend perbaikan, yang tercermin dari indeks pembangunan gender yang mendekati angka 100 yang menunjukkan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Misi V ini terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja untuk Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi dari capaian Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Namun capaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2019 masih rendah. Rendahnya nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Sumatera Utara disebabkan karena berkurangnya luasan hutan primer dan hutan sekunder dimana terdapat banyak hutan yang telah dialih fungsikan menjadi perkebunan, bangunan, gedung, perumahan, sarana prasarana umum, jalan dan sebagainya.

Tabel 3.15
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
Indeks Kualitas Udara (IKU)		86,6	
Indeks Kualitas Air (IKA)		78,80	
Indeks Tutupan Hutan (ITH)		46,45	
Total	68	68,2	102,4%

Capaian Kinerja untuk Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan dijelaskan sebagai berikut:

J) Indeks Kualitas Air

Meningkatnya kegiatan manusia akan memberikan kontribusi besar terhadap makin berkurangnya air yang layak untuk dimanfaatkan. Pembuangan limbah dari kegiatan manusia dapat menyebabkan pencemaran air sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali tanpa pengolahan lebih lanjut. Isu pencemaran, kelangkaan air bersih, banjir, merupakan keseharian yang sering kita dengarkan hampir disetiap wilayah di Indonesia. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sampai saat ini masih belum optimal untuk mengatasi hal tersebut.

Untuk mengukur kualitas air digunakan suatu nilai yang disebut Indeks Kualitas Air (IKA). Indeks Kualitas Air adalah indikator yang menunjukkan tingkat kualitas air di suatu wilayah, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Baku mutu air yang digunakan untuk penghitungan ini adalah baku mutu air kelas 1 & 2 sesuai dengan Lampiran Kriteria Mutu Air Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Pengelolaan Kualitas Air dengan 7 (tujuh) parameter yang dihitung yaitu BOD, COD, TSS, DO, fosfat, fecal coli, dan total coliform.

Metode yang dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Air Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019:

- Metode perhitungan Indeks Kualitas Air didasarkan pada metode perhitungan Indeks Pencemar Air Sebagaimana terdapat pada Kepmenlh 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
- Parameter yang wajib dianalisa meliputi: TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform;
- Baku Mutu Acuan adalah Kelas I dan II PP No.82 Tahun 2001;
- Badan air yang dinilai meliputi 1 Danau yaitu Danau Toba dan 8 sungai yaitu Sungai Asahan, Sungai Bah Bolon, Sungai Padang, Sungai Percut, Sungai Wampu, Sungai Deli, Sungai Belawan dan Sungai Batang Toru. Pada pemantauan Sungai parameter Fecal Coli tidak ikut dipantau sedangkan pada pemantauan Danau parameter Fecal Coli dan Total Coli tidak turut dipantau disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana.
- Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2019 adalah: 78,80

Nilai Indeks Kualitas Air dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain:

- (a) Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
- (b) Ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
- (c) Penggunaan air; dan
- (d) Tingkat erosi dan sedimentasi.

Sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal, Kementerian terkait lainnya dan Pemerintah Daerah serta pelaku usaha.

J) Indeks Kualitas Udara

Pertambahan penduduk menjadi faktor utama penurunan kualitas udara. Selain lokasi, kualitas udara dipengaruhi oleh sumber pencemar, polutan, serta meteorologi dan topografi. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh emisi dari berbagai sumber, baik dari proses alam diantaranya letusan gunung berapi dan kebakaran hutan ataupun akibat aktivitas manusia yang menghasilkan polutan seperti transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil, industri, pembangkit listrik, timbunan sampah dan penebangan liar. Untuk melihat kondisi kualitas udara di Indonesia salah satunya dengan menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU). Indeks Kualitas Udara merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum.

Indeks Kualitas Udara Provinsi dihitung berdasarkan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO₂ dan NO₂ dari hasil pengukuran kualitas udara ambien Kabupaten/ Kota. Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada daerah yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran. Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan dengan menggabungkan hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yaitu Dairi, Tapanuli Selatan, Tobasa, Langkat, Humbanghasundutan, Samosir, Tebingtinggi, dan Padangsidempuan dimana metoda pengukurannya adalah passive sampler untuk mendapatkan nilai Indeks Kualitas Udara.

Metode yang dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara adalah :

- Gambaran kualitas udara ambien diperoleh melalui analisa parameter SO₂ dan NO₂. Pengukuran parameter SO₂ dimaksudkan untuk memberi gambaran

tentang emisi dari industri dan kendaraan berbahan bakar solar serta bahan bakar lain yang mengandung sulfur sedangkan parameter NO₂ dimaksudkan untuk memberi gambaran emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berbahan bakar bensin.

- Metode penghitungan Indeks Kualitas Udara dilakukan dengan menggunakan passive sampler.
- Pengukuran dilakukan pada beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara seperti Dairi, Tapanuli Selatan, Tobasa, Langkat, Humbanghasundutan, Samosir, Tebingtinggi, dan Padangsidempuan. Pengukuran dilakukan mewakili lokasi pemukiman, industri, transportasi serta perkantoran.
- Nilai Indeks Kualitas Udara adalah : 86,60.

J) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Kualitas tutupan lahan (land cover) mendeskripsikan kondisi kenampakan permukaan lahan secara fisik, baik kenampakan alami berupa vegetasi maupun kenampakan buatan manusia. Kualitas tutupan lahan saat ini diukur berdasarkan keberadaan hutan sebagai salah satu komponen penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam klasifikasi penutupan lahan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan – KLHK, tutupan hutan meliputi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman.

Metode yang dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara:

- Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL) dilakukan dengan mengakumulasikan Luas Tutupan Hutan, Luas Semak Belukar dan Semak Belukar Rawa pada Kawasan Hutan, Luas Semak Belukar dan Semak Belukar Rawa pada sempadan sungai dengan kemiringan lereng >25% dan Luas Semak Belukar dan Semak Belukar Rawa pada sempadan danau dengan kemiringan lereng >25%.
- Berdasarkan Peta Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018, yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, yang diterima tahun 2019, diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Jenis dan luas tutupan lahan pada kawasan hutan
 2. Jenis dan luas tutupan lahan pada kawasan budidaya
 3. Jenis dan luas tutupan lahan pada sempadan sungai
 4. Jenis dan luas tutupan lahan pada sempadan danau
- Berdasarkan klasifikasi penjelasan kualitatif terhadap rentang nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2018 (sumber: IKLH Indonesia 2018), bahwa nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKTL) adalah 46,45 mengandung arti bahwa kualitas tutupan lahan Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori "Sangat Kurang Baik" ($40 < \text{IKLH} < 50$). Oleh karena itu, indeks kualitas tutupan lahan perlu difokuskan pada perbaikan dan peningkatan kualitas tutupan lahan pada tahun mendatang;
 - Tidak tercapainya target nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Sumatera Utara disebabkan karena berkurangnya luasan hutan primer dan hutan sekunder dimana terdapat banyak hutan yang telah dialih fungsikan menjadi perkebunan, bangunan, gedung, perumahan, sarana prasarana umum, jalan dan sebagainya.
- Kualitas tutupan lahan dapat ditingkatkan dengan mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung, rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi, kegiatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan, penghijauan untuk ekosistem darat dan rehabilitasi untuk ekosistem pesisir seperti mangrove.

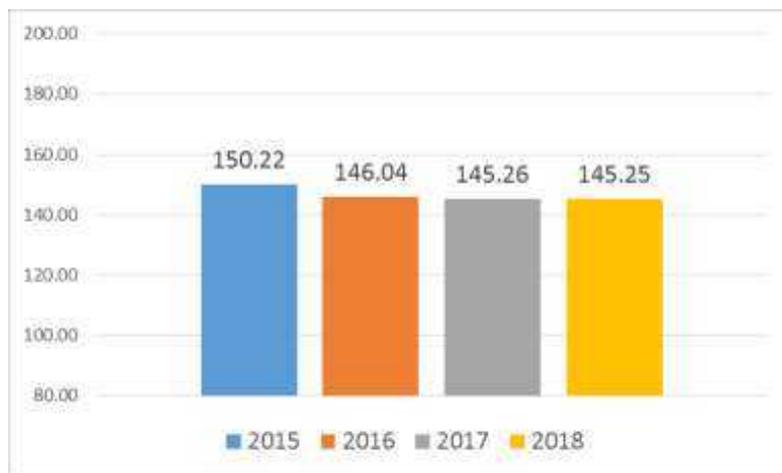
2. Indeks Resiko Bencana

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi besar terjadinya bencana alam, seperti bencana gempabumi dan letusan gunungapi. Hal ini disebabkan karena Provinsi Sumatera Utara mempunyai 4 (empat) ruas patahan yang menjadi sumber gempa, yakni patahan renun, patahan toru, patahan angkola dan patahan barumun. Selain itu, di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa gunungapi aktif. Salah satunya adalah Gunung Sinabung yang meletus sejak tahun 2013 dan menyebabkan masyarakat mengungsi hingga saat ini.

Kajian risiko bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas (capacities). Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempabumi, letusan

gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2018, Provinsi Sumatera Utara memiliki indeks risiko tinggi yaitu 145,25.

Grafik 3.2.
Indeks Resiko Bencana Sumatera Utara



Tabel 3.16
Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

NO.	KABKOTA	2015	2016	2017	2018	KELAS RISIKO 2018
1	KOTA GUNUNGSITOLI	215.60	215.60	215.60	215.60	TINGGI
2	MANDAILING NATAL	214.80	214.80	214.80	214.80	TINGGI
3	NIAS	214.00	214.00	214.00	214.00	TINGGI
4	NIAS UTARA	214.00	214.00	214.00	214.00	TINGGI
5	NIAS BARAT	210.80	210.80	210.80	210.80	TINGGI
6	NIAS SELATAN	202.00	202.00	202.00	202.00	TINGGI
7	TAPANULI TENGAH	191.20	191.20	191.20	191.20	TINGGI
8	TAPANULI SELATAN	186.00	186.00	186.00	186.00	TINGGI
9	ASAHAN	167.20	167.20	167.20	167.20	TINGGI
10	KOTA SIBOLGA	167.20	167.20	167.20	167.20	TINGGI
11	LABUHANBATU UTARA	155.20	155.20	155.20	155.20	TINGGI
12	PADANG LAWAS	154.00	154.00	154.00	154.00	TINGGI
13	LABUHANBATU	151.20	151.20	151.20	151.20	TINGGI
14	BATU BARA	143.20	143.20	143.20	143.20	SEDANG

15	LANGKAT	155.20	148.50	143.54	140.68	SEDANG
16	SERDANG BEDAGAI	140.00	140.00	140.00	140.00	SEDANG
17	PADANG LAWAS UTARA	138.00	138.00	138.00	138.00	SEDANG
18	LABUHANBATU SELATAN	131.20	131.20	131.20	131.20	SEDANG
19	HUMBANG HASUNDUTAN	130.00	130.00	130.00	130.00	SEDANG
20	KOTA PADANG SIDIMPUAN	128.00	128.00	128.00	128.00	SEDANG
21	DAIRI	127.60	127.60	127.60	127.60	SEDANG
22	DELI SERDANG	155.20	113.00	108.28	121.73	SEDANG
23	KARO	154.00	136.71	125.24	120.99	SEDANG
24	TAPANULI UTARA	118.00	118.00	118.00	118.00	SEDANG
25	SAMOSIR	114.00	114.00	114.00	114.00	SEDANG
26	KOTA TANJUNG BALAI	114.00	114.00	114.00	114.00	SEDANG
27	PAKPAK BHARAT	112.00	112.00	112.00	112.00	SEDANG
28	TOBA SAMOSIR	107.20	107.20	107.20	107.20	SEDANG
29	KOTA BINJAI	103.20	103.20	103.20	103.20	SEDANG
30	KOTA TEBING TINGGI	101.60	101.60	101.60	101.60	SEDANG
31	KOTA MEDAN	155.20	103.55	100.61	93.77	SEDANG
32	KOTA PEMATANGSIANTAR	91.20	91.20	91.20	91.20	SEDANG
33	SIMALUNGUN	95.20	75.03	73.59	73.59	SEDANG

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Sasaran Strategis 2 : Terciptanya masyarakat yang berbudaya sesuai dengan norma adat istiadat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

➤ Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera Utara melalui 4 (empat) pintu masuk pada bulan Desember 2019 mencapai 24.113 kunjungan, mengalami kenaikan 7,94 persen dibanding yang datang pada bulan November 2019 mencapai 22.340 kunjungan. Demikian juga jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2018, jumlah wisman pada bulan Desember 2019 mengalami kenaikan 10,68 persen dari 21.787 kunjungan pada bulan Desember 2018 menjadi 24.113 kunjungan. Kenaikan kunjungan jumlah wisman tertinggi pada bulan Desember 2019 dibanding bulan sebelumnya terjadi pada pintu masuk Pelabuhan Laut Tanjungbalai Asahan sebesar 89,86 persen, jumlah kunjungan wisman melalui Bandara Silangit mengalami kenaikan 14,31 persen dan jumlah kunjungan wisman melalui Bandara Kualanamu Internasional naik 6,77. Sedangkan jumlah kunjungan wisman melalui Pelabuhan Laut Belawan turun sebesar 100,00 persen.

Selama Desember 2019 jumlah wisman yang berkunjung di Sumatera Utara mencapai 24.113 kunjungan, naik 10,68 persen dibanding jumlah wisman pada periode yang sama tahun 2018. Kenaikan terbesar terjadi pada jumlah wisman yang datang melalui pintu masuk Pelabuhan Laut Tanjungbalai sebesar 18,82 persen dan kunjungan wisman melalui pintu masuk Bandara Internasional Kualanamu naik sebesar 12,35

persen. Sementara itu jumlah wisman yang datang melalui pintu masuk Bandar Udara Silangit turun sebesar 15,10 persen dan jumlah wisman yang datang melalui pintu masuk Belawan turun sebesar 100,00 persen.

Dari sepuluh negara pasar utama wisman pada Desember 2019, Malaysia masih mendominasi jumlah wisman yang datang di Sumatera Utara yaitu 54,25 persen, diikuti oleh Singapura 7,56 persen, Tiongkok 4,53 persen, Belanda 3,55 persen, Australia 1,54 persen, Jerman 1,28 persen, India 1,13 persen, Inggris 1,10 persen, Amerika Serikat 0,97 persen dan Taiwan 0,81 persen. Jumlah wisman dari sepuluh negara tersebut adalah 76,72 persen dari total kedatangan wisman di Sumatera Utara. Kenaikan jumlah kunjungan wisman ke Sumatera Utara bulan Desember 2019 terhadap November 2019 yang mencapai 7,94 persen, searah dengan total kunjungan wisman yang masuk ke Indonesia bulan Desember 2019 yang mengalami kenaikan sebesar 6,66 persen atau dari 1.291.117 bulan November 2019 menjadi 1.377.067 kunjungan pada bulan Desember 2019.

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah 2019	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau					
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kerukunan umat beragama					
1	Indeks Kerukunan umat beragama	Poin	77	76,30	99,09
Sasaran Strategis 2 : Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan					
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,4	89,6	99,19
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kesejahteraan petani					
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Skor	100,10	99,08	98,98
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas hunian kawasan permukiman					
1	Rasio rumah layak huni	Persen	92,72	93,18	100,46

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,74	68,74	100
Sasaran Strategis 6 : Menurunnya tingkat pengangguran					
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,5	5,5	100
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi					
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,3	5,11	96,42
Sasaran Strategis 8 : Menurunnya angka kemiskinan					
1	Persentase Kemiskinan	Persen	8,87	8,63	97,29
Sasaran Strategis 9 : Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan					
1	Indeks Gini	Poin	0,325	0,317	102,52
Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya infrastruktur dasar					
1	Tingkat kemantapan jalan Provinsi	Persen	82,99	82,19	99,04
2	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,90	99,11	99,21
Sasaran Strategis 11 : Terkendalnya inflasi					
1	Inflasi	Persen	2,95	2,33	126,61
Sasaran Strategis 12 : Terkendalnya Jumlah penduduk					
1	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,86	2,82	98,60
Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat					
1	IPM	Poin	71,12	71,18	100,08
Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis					
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola yang berintegritas					
1	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP	-	
2	Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	100
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat					
1	Persentase penegakan Perda	Persen	45	57	127
Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri					
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan					
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,79	9,79	100
Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia					

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan					
1	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	Poin	0,90	1,18	131
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan					
1	Indeks pembangunan gender	Poin	90,87	90,93	100,07
Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab					
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,00	68,2	103,3
2	Indeks Resiko Bencana	Poin	145	145,25	
Sasaran Strategis 2 : Terciptanya masyarakat yang berbudaya sesuai dengan norma adat istiadat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata					
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	280.000	1.377.016	492

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah dapat terealisasi dengan sangat baik.

3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Standar Nasional	Realisasi
			2019	2019
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau				
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kerukunan umat beragama				
1	Indeks Kerukunan umat beragama	Poin	73,83	76,30
Sasaran Strategis 2 : Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan				
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	92,5	89,6
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kesejahteraan petani				
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Skor	104,46	
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas hunian kawasan permukiman				
1	Rasio rumah layak huni	Persen	NA	

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,39	68,74
Sasaran Strategis 6 : Menurunnya tingkat pengangguran				
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen		
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi				
1	Pertumbuhan PDRB	Persen		
Sasaran Strategis 8 : Menurunnya angka kemiskinan				
1	Persentase Kemiskinan	Persen	9,66	8,63
Sasaran Strategis 9 : Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan				
1	Indeks Gini	Poin		
Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya infrastruktur dasar				
1	Tingkat kemantapan jalan Provinsi	Persen	NA	82,19
2	Rasio Elektrifikasi	Persen	NA	99,11
Sasaran Strategis 11 : Terkendalnya inflasi				
1	Inflasi	Persen	2,72	2,33
Sasaran Strategis 12 : Terkendalnya Jumlah penduduk				
1	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	NA	2,82
Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat				
1	IPM	Poin	70 – 80	71,18
Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis				
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola yang berintegritas				
1	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	-	-
2	Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	Predikat	-	B
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat				
1	Persentase penegakan Perda	Persen	NA	57
Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri				
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan				
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun		
Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia				
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan				
1	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	Poin	NA	1,18

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan				
1	Indeks pembangunan gender	Poin	NA	
Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab				
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	NA	68,2
2	Indeks Resiko Bencana	Poin	NA	145,25
Sasaran Strategis 2 : Terciptanya masyarakat yang berbudaya sesuai dengan norma adat istiadat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata				
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	NA	1.1377.016

3.6 Keberhasilan dan Permasalahan/Kegagalan Kinerja

A. Keberhasilan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan sasaran misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus melakukan peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
2. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian;
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Guna meningkatkan keragaman pola pangan dapat tercapai didukung oleh program : Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan. Rumah layak huni didukung oleh program : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan

Pengembangan Perumahan. Dalam rangka mewujudkan kesehatan yang prima didukung :

1. Program obat dan perbekalan kesehatan;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Program perbaikan gizi masyarakat;
5. Program pengembangan lingkungan sehat;
6. Program pencegahan dan pengendalian penyakit;
7. Program peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus, Laboratorium Kesehatan;
8. Program pengembangan sumber daya kesehatan;
9. Program kebijakan dan manajemen kesehatan;
10. Program pembinaan pelayanan kesehatan;
11. Program jaminan pemeliharaan kesehatan.

Untuk mewujudkan kestabilan harga di masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didukung oleh Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah daerah.

Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan, difasilitasi dengan peningkatan penjualan produksi KUKM dan peningkatan sarana usahanya sekaligus meningkatkan mutu produknya dengan memberikan sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual, sertifikasi Halal dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu, untuk mencapainya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan.

Selain itu, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya rasa berbangsa dan bernegara perlu diberikan pembekalan wawasan kebangsaan

sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan. Untuk mewujudkannya didukung oleh :

1. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberikan kontribusi signifikan atas pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Kesenjangan tingkat pendidikan penduduk dirasakan masih cukup besar, terutama tingkat pendidikan penduduk perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut disebabkan, antara lain, oleh ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama ke atas. Di samping itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belum tersedia secara memadai

Keberhasilan misi ini dicapai dengan sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dengan didukung :

1. Program Pembinaan Pendidikan Khusus;
2. Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
3. Program Sekolah Menengah Kejuruan;
4. Program Pembinaan dan Ketenagaan;
5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Lainnya.

Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.

Keberhasilan misi ini dicapai dengan sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan dan meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, yang didukung :

1. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindakan Kriminal;

2. Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
3. Program peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.

Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan yang Maha esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu hubungan yang terjalin antara seluruh benda, daya, dan kondisinya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan hal yang ada di sekitarnya. Yang termasuk dalam suatu hubungan ini ialah manusia dan tingkah lakunya. Maka dari itu, jika lingkungan hidup rusak, kualitas lingkungan hidupnya pun akan turun, kalau kualitas lingkungan hidup menurun akan muncul berbagai masalah.

Untuk memajukan pariwisata Sumatera Utara, kemudahan akses infrastruktur, amenities, promosi dan pelaku bisnis perlu menjadi perhatian guna mengembangkan sektor pariwisata. Promosi khususnya untuk kawasan wisata Danau Toba yang dijadikan pemerintah sebagai kawasan strategis pariwisata.

Keberhasilan misi ini dicapai dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup;
2. Program pemasaran pariwisata;
3. Program destinasi pariwisata;
4. Program pengembangan kepariwisataan.

B. Permasalahan/Kegagalan

Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut telah tercapai dengan mendapat kategori "sangat baik" sekaligus memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

Untuk merealisasikan seluruh indikator kinerja dimaksud tetap didukung oleh program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sehingga dukungan dan komitmen Kepala Perangkat Daerah sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum selama tahun 2019. APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023 serta kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, pokok-pokok pikiran DPRD, hasil musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 dan hasil identifikasi aspirasi masyarakat lainnya yang disampaikan, baik melalui perangkat daerah maupun DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan Umum Pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 yang disepakati telah dirumuskan dalam Arah Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2019 serta Strategi dan Prioritas APBD tahun 2019.

Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 14.726.662.153.406,20 dimana sebesar Rp. 10.322.571.556.659,70 atau 70,09 persen untuk keperluan belanja tidak langsung dan sisanya 29,91 persen atau Rp 4.404.090.596.746,51 untuk keperluan belanja langsung.

Belanja tidak langsung sebesar Rp. 10.322.571.556.659,70 dialokasikan untuk keperluan :

- Belanja Pegawai Rp. 3.714.764.358.168,68
- Belanja Hibah Rp. 3.230.010.871.200,00
- Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 3.345.467.946.191,00
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Rp. 7.328.421.900,00

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

- Belanja Tidak Terduga Rp. 25.000.000.000,00
- Belanja langsung sebesar Rp. 4.404.090.596.746,51 dialokasikan untuk keperluan :
- Belanja Pegawai Rp. 99.863.671.573,00
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.726.845.451.823,53
 - Belanja Modal Rp. 1.557.381.473.349,98

Tabel 3.19

ALOKASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH PENGELOLA APBD PEMPROVSU TA. 2019

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ANGGARAN BELANJA		JUMLAH
		LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	1.191.941.733.924	1.969.789.852.477,33	3.161.731.586.401,33
2	Dinas Kesehatan	237.441.149.805	135.480.684.696	372.921.834.501,00
3	RS. Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	22.329.293.138	41.381.573.711	63.710.866.849,00
4	RSU Haji Daerah	90.310.487.171	0	90.310.487.171,00
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	697.343.316.602,75	82.719.833.605	780.063.150.207,75
6	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	284.304.102.645,37	121.599.720.440	405.903.823.085,37
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	121.662.533.747	19.488.181.667,62	141.150.715.414,62
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.294.634.228	12.009.793.000	28.304.427.228,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	15.159.070.400	12.082.111.381	27.241.181.781,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.347.545.612,00	12.279.984.000	42.627.529.612,00
11	Dinas Sosial	38.048.020.020	69.140.682.786,46	107.188.702.806,46
12	Dinas Tenaga Kerja	13.310.422.253,62	41.151.943.170	54.462.365.423,62
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.813.209.619,72	8.827.162.000	17.640.371.619,72
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	96.615.273.288,30	34.478.845.519	131.094.118.807,30
15	Dinas Lingkungan Hidup	45.249.627.467	24.015.210.855	69.264.838.322,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.501.244.273	10.034.211.535	22.535.455.808,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.037.620.970	12.035.944.000	32.073.564.970,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	7.643.861.949	6.943.312.285	14.587.174.234,00
19	Dinas Perhubungan	22.476.376.859,46	38.564.389.000	61.040.765.859,46

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ANGGARAN BELANJA		JUMLAH
		LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.065.390.255	19.706.272.000	45.771.662.255,00
21	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	34.811.596.086	17.308.133.000	52.119.729.086,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	10.672.234.868	17.362.973.000	28.035.207.868,00
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	132.433.536.874	17.496.280.598	149.929.817.472,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	37.548.361.943,44	62.351.698.741	99.900.060.684,44
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	17.985.589.882	17.604.799.000	35.590.388.882,00
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	52.492.489.815,20	24.872.054.400	77.364.544.215,20
27	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	195.875.027.360,40	1.295.239.175	197.170.266.535,40
28	Dinas Perkebunan	37.618.462.491	23.293.975.000	60.912.437.491,00
29	Dinas Kehutanan	77.156.707.170	122.778.970.364	199.935.677.534,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	44.111.680.084	19.810.520.000	63.922.200.084,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.707.455.523	33.771.361.870	57.478.817.393,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.517.034.167	17.432.044.445,46	35.949.078.612,46
33	BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	80.841.026.765	6.628.847.170.284,81	6.709.688.197.049,81
34	Badan Kepegawaian Daerah	16.791.911.932	16.953.620.028	33.745.531.960,00
35	Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	23.737.664.351	19.403.055.000	43.140.719.351,00
36	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.295.316.938	10.002.059.000	21.297.375.938,00
37	KDH DAN WKDH	0	11.773.931.040	11.773.931.040,00
38	Sekretariat Daerah	182.788.948.652,28	83.594.030.035,00	266.382.978.687,28
39	Sekretariat DPRD	249.945.113.266	143.138.523.100	393.083.636.366,00
40	INSPEKTORAT	34.200.000.000	26.886.376.116	61.086.376.116,00
41	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	171.172.614.717	268.014.258.014	439.186.872.731,00
42	Badan Penghubung Daerah Provinsi	10.699.367.953	8.644.318.000	19.343.685.953,00
43	SKPKD	0		6.607.807.198.491,00
	Jumlah	4.462.297.055.067	10.264.365.098.339,70	14.726.662.153.406,20

Sumber data : BPKAD PROVSU sebelum diaudit BPK

➤ Realisasi

Data Realisasi belanja berdasarkan SP2D Realisasi Perangkat Daerah Pengelola APBD Pemprov Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 13.531.354.346.473,20 atau terealisasi sebesar 91,88 % dari anggaran belanja APBD Pemprov Tahun Anggaran 2019.

Tabel. 3.20

REALISASI BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
BERDASARKAN SP2D APBD PEMPROVSU TA. 2019

No	PERANGKAT DAERAH	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	1.132.944.586.049	1.908.806.135.726	3.041.750.721.775
2	Dinas Kesehatan	222.928.667.967	126.274.744.468	349.203.412.435
3	RS. Jiwa Daerah Prof. Dr. M. Ildrem	21.420.495.132	38.198.856.261	59.619.351.393
4	RSU Haji Daerah	31.301.547.154	0	31.301.547.154
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	568.002.594.759	78.227.024.586	646.229.619.345
6	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	238.394.969.208	113.549.514.908	351.944.484.116
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	104.496.014.496	16.472.271.970	120.968.286.466
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.068.751.306	10.943.951.546	23.012.702.852
9	Satuan Polisi Pamong Praja	13.648.693.007	11.191.265.572	24.839.958.579
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.551.881.212	10.945.196.067	40.497.077.279
11	Dinas Sosial	35.989.603.839	63.257.008.714	99.246.612.553
12	Dinas Tenaga Kerja	12.788.741.479	37.076.493.848	49.865.235.327
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.406.279.635	8.082.347.528	14.488.627.163
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	88.168.542.560	32.500.092.213	120.668.634.773
15	Dinas Lingkungan Hidup	42.578.872.161	22.289.785.456	64.868.657.617
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.329.627.254	9.472.184.768	20.801.812.022
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.474.092.692	11.107.355.394	28.581.448.086
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah	8.040.441.525	6.573.385.198	14.613.826.723
19	Dinas Perhubungan	18.949.075.851	33.906.529.123	52.855.604.974
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.685.610.408	17.571.071.334	40.256.681.742
21	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	32.288.812.061	15.224.168.700	47.512.980.761

22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	9.461.977.798	15.475.855.414	24.937.833.212
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	115.445.426.704	16.928.984.380	132.374.411.084
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	52.997.247.875	23.630.141.746	76.627.389.621
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	16.906.516.655	16.110.427.722	33.016.944.377
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	45.489.093.142	22.706.941.774	68.196.034.916
27	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	98.363.116.186	85.411.024.288	183.774.140.474
28	Dinas Perkebunan	35.356.087.738	22.047.749.468	57.403.837.206
29	Dinas Kehutanan	48.271.910.236	107.140.736.581	155.412.646.817
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	39.814.238.863	18.479.408.097	58.293.646.960
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.575.365.658	30.354.710.541	51.930.076.199
32	KDH & WKDH	0	11.526.979.723	11.526.979.723
33	Sekretariat Daerah	162.186.836.099	75.066.060.426	237.252.896.525
34	Sekretariat DPRD	180.285.681.507	124.130.694.952	304.416.376.459
35	Badan Penghubung Daerah Provinsi	10.413.725.270	8.181.778.796	18.595.504.066
36	Inspektorat Daerah Provinsi	34.148.689.001	24.074.465.623	58.223.154.624
37	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	17.987.728.121	16.165.726.875	34.153.454.996
38	BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	64.188.006.048	18.505.366.397	82.693.372.445
39	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	144.234.393.443	193.438.539.465	337.672.932.908
40	Badan Kepegawaian Daerah	13.278.770.439	15.636.616.834	28.915.387.273
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.349.817.799	17.692.129.843	41.041.947.642
42	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.287.088.753	9.660.209.705	20.947.298.458
43	SKPD	0	6.270.820.797.353	6.270.820.797.353
	Jumlah Belanja	3.816.499.617.090	9.714.854.729.383	13.531.354.346.473

Sumber data : BPKAD PROVSU sebelum audit BPK



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan ini disusun berdasarkan dokumen RPJMD Tahun 2019—2023, dokumen perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2019.

Keberhasilan maupun kegagalan tersebut digambarkan dalam capaian Indikator Kinerja Utama serta analisis kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan sebagai sarana/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban

B. Langkah Yang Akan Dilaksanakan Di Masa Mendatang

Penguatan akuntabilitas instansi pemerintah salah satunya melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem AKIP ini dirancang untuk mengukur dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan sampai ke aparatur sipil negara untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara di mulai dari peningkatan kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 sampai ke dokumen pelaksanaan anggaran di masing-masing Perangkat Daerah;
3. Menyelaraskan sistem perencanaan, sistem penganggaran sampai ke sistem akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan;
4. Memanfaatkan perencanaan kinerja secara optimal sebagai alat untuk mengendalikan kinerja dan memperbaiki kinerja;
5. Melakukan monitoring atas realisasi target secara periodik atas kinerja Rencana Aksi secara Berkala;
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.



LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA
GUBERNUR SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**



TAHUN 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

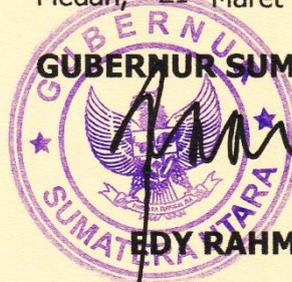
Nama : EDY RAHMAYADI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Medan, 21 Maret 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			VOLUME	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kerukunaan umat beragama	- Indeks kerukunan umat beragama	77	Poin
2	Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,4	Skor
3	Meningkatnya kesejahteraan petani	- Nilai Tukar Petani (NTP)	100,10	Poin
4	Meningkatnya Kualitas hunian dan Lingkungan Kawasan Permukiman	- Rasio Rumah Layak Huni	92,72	Persen
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	- Usia Harapan Hidup (UHH)	68,54	Tahun
6	Menurunnya tingkat pengangguran	- Tingkat pengangguran terbuka	5,5	Persen
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	- Pertumbuhan PDRB	5,3	Persen
8	Menurunnya angka kemiskinan	- Persentase Kemiskinan	8,87	Persen
9	Menurunnya tingkat ketimpangan Pendapatan dan pemerataan pembangunan	- Indeks Gini	0,325	Poin
10	Meningkatnya infrastruktur dasar	1 Tingkat kemantapan jalan provinsi	82,99	Persen
		2 Layanan Irigasi permukaan dalam kondisi optimal	84	Persen
		3 Cakupan Layanan Air Minum Layak	89,23	Persen
		4 Rasio Elektrifikasi	99,90	Persen
11	Terkendalinya inflasi	- Inflasi	2,95	Persen
12	Terkendalinya Jumlah penduduk	- Total Fertility Rate (TFR)	2,86	Nilai
13	Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	- IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	71,12	Poin
14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas	1 Opini BPK Terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah	WTP	Opini
		2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B	Predikat
15	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	- Persentase Penegakan Perda	45	Persen
16	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	- Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,79	Tahun
17	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan	- Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0,90	Poin
18	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	- Indeks Pembangunan Gender	90,87	Poin
19	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,6	Poin
		2 Indeks Resiko Bencana	140	Poin
20	Terciptanya masyarakat yang berbudaya sesuai dengan norma adat istiadat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata	- Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	280.000	Orang



 GUBERNUR SUMATERA UTARA,
 EDY RAHMAYADI